



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN
KEPALA SKK MIGAS DAN 10 KKKS TERBESAR**

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Kepala SKK Migas dan 10 KKKS Terbesar
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Kamis, 10 Januari 2019
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB s.d 14.10 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Ketua Rapat	:	Tamsil Linrung (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F. PKS)
Sekretaris Rapat	:	Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	:	... Orang dari 50 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Acara	:	1. Program SKK Migas Kerja Tahun 2019 2. Penanganan Illegal Drilling dan Illegal Tapping 3. Pengelolaan Limbah B3 pada Lokasi Wilayah Kerja Migas 4. Lain-lain.

KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 dibuka pukul 10.30 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung, dan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Program SKK Migas Kerja Tahun 2019
 - b. Penanganan Illegal Drilling dan Illegal Tapping
 - c. Pengelolaan Limbah B3 pada Lokasi Wilayah Kerja Migas
 - d. Dan lain-lain.

II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi kepada SKK Migas atas upayanya dalam pemangkasan izin atau penyederhanaan perizinan usaha hulu Migas dan meminta untuk meningkatkan kinerja hulu Migas dalam mendukung kedaulatan energi nasional dan energi berkeadilan.
2. Komisi VII DPR RI meminta Kepala SKK Migas untuk menyampaikan data rincian realisasi pelaksanaan Cost Recovery dan Penggunaan Tenaga Kerja oleh KKKS Tahun 2018 beserta rencana Tahun 2019.
3. Komisi VII DPR RI meminta Kepala SKK Migas untuk menyampaikan data tentang kasus *illegal drilling* dan *illegal tapping* serta jenis gangguan lain, yang meliputi data tentang lokasi, modus, potensi kerugian, dan upaya penanganan yang telah dilakukan.
4. Komisi VII DPR RI meminta Kepala SKK Migas untuk menyampaikan data 3 (tiga) tahun terakhir pengelolaan limbah oleh KKKS, yang meliputi data tentang jenis limbah, kapasitas/volume, teknologi pengolahan, manifes hasil limbah, dan pihak (badan usaha) yang ditunjuk melakukan pengolahan limbah.
5. Komisi VII DPR RI mendesak Kepala SKK Migas melakukan percepatan pelaksanaan program CSR dan program pengembangan masyarakat agar segera dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas dan nyata.

6. Komisi VII DPR RI meminta Kepala SKK Migas memberikan data dan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI, disampaikan paling lambat tanggal 18 Januari 2019.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 14.10 WIB

KEPALA SKK MIGAS



DWI SOETJIPTO

Jakarta, 10 Januari 2019

KETUA RAPAT,



TAMSIL LINRUNG